

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Partai politik sebagai wadah atau muara bertemunya banyak kepentingan sudah barang tentu rawan terjadi konflik. Partai politik sebagai organisasi modern akan selalu dihadapkan pada realitas konflik. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung atas mekanisme *input* dan *output* sistem pengambilan keputusan DPP, termasuk dalam pengetahuan hak dan kewajiban selaku DPW dalam konflik yang terjadi di tingkat pusat sudah baik, dimana Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung mengetahui pengetahuan, latar belakang, dan kronologi konflik serta yang terjadi pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
2. Perasaan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung terhadap sistem kepemimpinan DPP termasuk peran aktor (politisi) dan pengurusan partai politik, dimana Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung menganggap bahwa kepemimpinan yang sah adalah kepemimpinan DPP PPP dan pengurusan partai politik oleh Djan Faridz.

3. Keputusan dan pendapat individu Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung tentang kepemimpinan DPP yang secara tipikal yang melibatkan standar nilai, kriteria informasi dan perasaan, dimana dalam setiap proses pengambilan keputusan DPW berdasarkan pada keputusan yang diambil dari Dewan Pimpinan Pusat. Keputusan dan pendapat anggota Dewan Pimpinan Wilayah PPP Lampung mengesahkan kepemimpinan Djan Faridz.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, menunjukkan bahwa terjadinya konflik di Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) khususnya di DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lampung terjadi akibat tidak adanya komunikasi yang kuat baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah sehingga menghasilkan perbedaan-perbedaan pandangan antara petinggi, anggota maupun kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa saran yang dianggap penting untuk penulis sampaikan.

1. Jika kedepannya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak ingin kembali terjadi konflik mengenai hal-hal yang sudah disepakati sebelumnya seperti konflik mengenai ide dasar ataupun platform, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) perlu melakukan Penanaman ideologi yang lebih jelas sampai ke akar, mulai dari tingkat pusat, wilayah, sampai ke tingkat daerah.
2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) perlu mengadakan dialog demokrasi di dalam tubuh partai, sehingga nantinya mulai dari tingkat pusat, wilayah, sampai ke daerah bisa meresapi berbagai prinsip dan kebijakan yang

berlaku di internal partai.

3. Dalam upaya membesarkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan pencapaian tujuan memenangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu perlu kiranya para pengurus, anggota, dan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersatu kembali dan mendahulukan kepentingan Partai di atas kepentingan pribadi untuk menjalankan kembali Visi Misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).